

**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

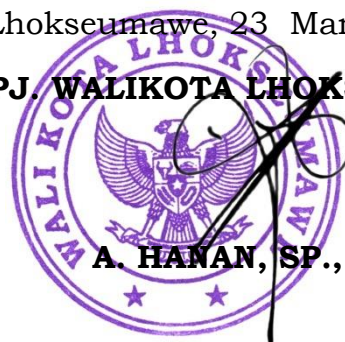
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya sehingga masih diberikan kemampuan melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan dapat menyelesaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Lhokseumawe tahun 2023.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Lhokseumawe tahun 2023 ini merupakan gambaran atas kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe secara umum selama 1 (satu) tahun berdasarkan tolok ukur kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja selama tahun 2023, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ini, Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin

Lhokseumawe, 23 Maret 2024

PJ. WALIKOTA LHOKSEUMAWE



A. HANAN, SP., MM

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
1. Capaian Kinerja Makro	1
2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar	2
1 Urusan Pendidikan.....	2
2 Urusan Kesehatan.....	13
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	23
4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	43
5 Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	51
6 Urusan Sosial.....	61
3. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya	68
1 Hasil EPPD Tahun Sebelumnya.....	68
2 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya.....	69
4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah	69
5. Inovasi Daerah	112

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PELAPORAN IKK MAKRO TAHUN 2023 KOTA LHOKSEUMAWE							
NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	LAJU KINERJA 2023	SATUAN	PEMDA KETERANGAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	78.04	80.26	2.845	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	10.84	10.73	-1.015	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	9.15	8.78	-4.044	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.01	4.21	4.988	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	52907910	56596650	6.972	%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Ketimpangan Pendapatan	0.348	0.311	-10.632	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe

Sumber data : Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2023

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintah wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (URUSAN PENDIDIKAN) KOTA LHOKSEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN PERSENTASE KINERJA	
					2022	2023
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	51.49	70.53

			atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang			
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	74.24	76.14

			kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 			
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	65.12	57.74

			menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang			
--	--	--	--	--	--	--

			memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat			
1.a.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100

			sekolah8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 			
--	--	--	---	--	--	--

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 sebesar **Rp. 139.982.868.738,00** dengan program/kegiatan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan beserta alokasi dan realisasi anggaran pada urusan Pendidikan yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.025.833.071,00	120.885.092.823,00	96,69 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.650.000,00	96.383.350,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	116.075.657.471,00	113.175.078.482,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.000.000,00	144.915.243,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.568.525.600,00	7.345.482.748,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.000.000,00	83.233.000,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	27.157.164.766,00	19.049.275.915,00	70,14 %

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14.932.438.579,00	12.160.552.693,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.216.228.127,00	6.294.759.442,00	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.010.958.060,00	76.866.280,00	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	997.540.000,00	517.097.500,00	
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	48.500.000,00	48.500.000,00	100,00 %
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	48.500.000,00	48.500.000,00	
TOTAL		152.231.497.837	139.982.868.738	91,95 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokaeumawe Tahun 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe adalah OPD yang melaksanakan urusan wajib di Bidang Pendidikan

Pegawai / Personil

Jumlah PNS yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2023 berjumlah **67** orang yang tersebar di seluruh Bidang dan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Berikut komposisi PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

JENIS KELAMIN		GOLONGAN					TOTAL
LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	IV	III	II	I	67
35	32	67	11	47	9	0	

Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pendidikan setiap tahunnya dilakukan dengan mengusulkan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam penyusunan RAPBK. Dimana prosesnya sejak dari tahap Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan DPA. RAPBK diajukan kepada DPRK dan dibahas sebelum disahkan menjadi APBD. Kegiatan yang disetujui dalam APBD tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Saat ini sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan memadai. Namun belum adanya gedung kantor yang memadai merupakan suatu kendala yang cukup mengganggu, terutama untuk penyimpanan dokumen. Kantor yang terlalu sempit menyulitkan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pada Dinas Pendidikan yang terus menerus sifatnya.

C. Permasalahan Dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Permasalahan

- Distribusi dana BOS masih belum dilaksanakan tepat waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga kehilangan momentum dalam pemanfaatan dana BOS dimaksud.
- Masih ditemukan adanya distribusi guru dan tenaga pengajar yang belum mempertimbangkan azas pemerataan, proporsional pada sekolah-sekolah sehingga terjadi ketimpangan baik dari sisi jumlah maupun kompetensi
- Masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur PNS baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dalam penerapan SPM tidak terlaksana optimal
- Dalam meningkatkan dunia pendidikan di Kota Lhokseumawe agar dapat melakukan pengawasan terkait penempatan guru-guru tenaga pengajar setiap sekolah yang ada di Kota Lhokseumawe, penempatan guru-guru yang memiliki kompetensi hendaknya tidak disekolah sekolah favorit saja dan harus menyebar di seluruh sekolah dalam 4 (empat) kecamatan;
- Belum adanya koordinasi berkelanjutan antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian target Standar pelayanan Minimal (SPM). Akibatnya proses verifikasi maupun validasi data kebutuhan pelayanan dasar tidak dapat dilakukan sementara target capaian pelayanan harus ditentukan secara akurat, tepat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Jalannya pelaksanaan proses belajar dan mengajar, terkait pengadaan buku-buku LKS di sekolah-sekolah, agar tidak ada sekolah-sekolah yang mengutip biaya saat pembagian buku-buku tersebut pada siswa-siswi;

- Belum adanya kepastian lahan untuk merencanakan pembangunan pada calon penerima manfaat penerapan SPM sehingga seringkali target sasaran kegiatan yang membutuhkan tidak dapat dibantu;
- Masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur PNS baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dalam penerapan SPM tidak terlaksana optimal; dan
- Kegiatan yang termasuk bagian penerapan SPM muncul setelah anggaran perubahan memiliki keterbatasan waktu dalam proses pelelangan maupun penyelesaian pekerjaan.

Solusi :

- Segera Melakukan Koordinasi Dengan Tim BOSP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Serta Satuan Pendidikan, Berkenaan Dengan Informasi Tersendatnya Penyaluran Dana BOS;
- Pendistribusian Guru Sudah Kami Lakukan Pemerataan Sesuai Kebutuhan, Dan akan Segera Mengusulkan Anggaran Untuk Peningkatan Kompetensi;
- Perlu adanya peninjauan kembali terhadap SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang;
- Agar pendistribusian guru berkompentensi merata ke seluruh satuan pendidikan di seluruh kecamatan di wilayah Kota Lhokseumawe;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi maupun lembaga terkait dalam penentuan sasaran dan target capaian pelayanan.

Sebaiknya dibentuk Tim Penerapan SPM Pendidikan Dasar pada awal tahun anggaran;

- Untuk penunjang proses PBM di sekolah pemerintah telah mengalokasikan dana BOS, besar biayanya sesuai dengan jumlah murid. Pengeluaran dana BOS telah diatur dalam JUKNIS BOS, artinya operasional dana BOS wajib mengikuti JUKNIS BOS;
- Pemerintah perlu melakukan stimulasi terhadap target sasaran penerapan SPM yang terkendala dalam penyediaan lahan;
- Perlu adanya perhatian dari TAPK Lhokseumawe terhadap pengalokasian dana penunjang dalam penerapan SPM Pendidikan Dasar terutama terhadap pengusulan penambahan fasilitas penunjang kegiatan dan penyusunan laporan SPM;
- Perlu adanya peninjauan kembali terhadap SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang;
- Perlu adanya penambahan sumber daya Aparatur PNS yang kompeten untuk mendukung penerapan SPM, apabila tidak terpenuhi dapat mengalokasikan anggaran untuk merekrut tenaga fasilitator lapangan ataupun tenaga ahli individual khususnya kegiatan bersumber dana APBD; dan
- Perlu pengusulan anggaran dan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan hasil verifikasi kebutuhan untuk menghindari terjadinya perubahan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

Hal Lain yang Dilaporkan

Adapun Total Belanja pada Urusan Pendidikan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar **Rp. 152.231.497.837,00** (Seratus lima puluh dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah)

dan terealisasi sebesar **Rp. 139.982.868.738,00** (seratus tigah puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan capaian persentase sebesar **91,95%**

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (URUSAN KESEHATAN) KOTA LHOKSEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
1.b.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/ko ta yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	5.24	4.84
1.b.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	90.90	100
1.b.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92.54	82.87
1.b.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	91.49	84.43

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (URUSAN KESEHATAN) KOTA LHOKSEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	persalinan		
1.b.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	87.66	83.83
1.b.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	74.66	77.86
1.b.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96.95	67.35
1.b.8	Urusan	Kesehatan	1. Jumlah	Persentase	80.03	99.91

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (URUSAN KESEHATAN) KOTA LHOKSEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
	Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar		dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
1.b.9	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	94.82	96.99
1.b.10	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	86.63	84.10
1.b.11	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89.29	86.70
1.b.12	Urusan	Kesehatan	1. Jumlah	Persentase	90.32	96.20

[illegible]

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 sebesar **Rp. 90.018.280.658** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan beserta alokasi dan realisasi anggaran pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Program Kegiatan dan Anggaran serta Realisasi anggaran
pada Urusan Kesehatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.898.556.396,00	63.110.107.255,00	98,77 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.475.936,00	17.405.600,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61,286,059,900.00	60,925,124,338.00	
	Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	45,000,000.00	0.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	435,280,000.00	413,389,723.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,215,440,560.00	1,048,570,594.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899,300,000.00	705,617,000.00	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34,105,657,797.00	26,690,102,073.00	78,26 %
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7,768,660,000.00	6,854,552,858.00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan	26,201,997,797.00	19,729,641,052.00	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan SecaraTerintegrasi	95,000,000.00	87,408,163.00	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000.00	18,500,000.00	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,129,883,000.00	119,952,957.00	10,62 %
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	20,000,000.00	20,000,000.00	
	Perencanaan Kebutuhan dan PendayagunaanSumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	30,000,000.00	18,875,000.00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,079,883,000.00	81,077,957.00	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	121,000,000.00	82,070,183.00	67,83 %
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30,000,000.00	25,000,000.00	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah TanggaKelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	11,000,000.00	0.00	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	20,000,000.00	10,345,300.00	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene SanitasiTempatPengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	10,000,000.00	9,999,130.00	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	10,000,000.00	2,800,000.00	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	40,000,000.00	33,925,753.00	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	55,000,000.00	16,048,190.00	29,18 %
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000.00	8,000,000.00	
	Pelaksanaan Sehat dalamrangkaPromotifPreventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000.00	8,048,190.00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000.00	0.00	
	TOTAL	99.310.097.193	90.018.280.658	90,64

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Lhokaeumawe Tahun 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe adalah OPD yang melaksanakan urusan wajib di Bidang Kesehatan, yang mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memiliki fungsi tugas pokok pengelolaan dan manajemen di bidang Kesehatan.

Pegawai / Personil

Jumlah PNS yang berada di Dinas Kesehatan per 31 Desember 2023 berjumlah **67** orang, dengan komposisi dilihat pada tabel dibawah ini:

JENIS KELAMIN			GOLONGAN				
LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	IV	III	II	I	TOTAL
23	44	67	26	35	5	1	67

Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Kesehatan setiap tahunnya dilakukan dengan mengusulkan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam penyusunan RAPBK. Dimana prosesnya sejak dari tahap Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan DPA. RAPBK diajukan kepada DPRK dan dibahas sebelum disahkan menjadi APBK. Kegiatan yang disetujui dalam APBK tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Sampai dengan tahun 2023 sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dikatakan memadai dan perlunya peningkatan kapasitas dan sumber daya serta perlunya jadwal kegiatan harian yang terstruktur untuk satu tahun.

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- Capaian IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) pada tahun 2023 = 56,6%
- Pelayanan dasar kesehatan masyarakat di Kota Lhokseumawe masih belum optimal, mengingat sampai saat ini Kota Lhokseumawe belum mempunyai rumah sakit umum daerah yang dapat dipergunakan sebagai fasilitas pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan BPJS, seringkali dipandang tidak adil dalam memberikan pelayanan terhadap pasien BPJS. Oleh karena itu Walikota diharapkan untuk terus mengupayakan untuk hadirnya RSUD Kota Lhokseumawe yang representatif sebagai fasilitas utama untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan.
- Fasilitas pelayanan dasar kesehatan masyarakat dan ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas belum tersedia secara cukup.
- Konsistensi antar variabel terkait masih belum terjaga
- Validitas data pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih relatif rendah.
- Konsistensi antar variabel terkait masih belum terjaga.
- Belum optimalnya Capaian SPM sesuai dengan target nasional.

Solusi :

- Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta kepada Walikota untuk mengeluarkan surat edaran sertifikat Imunisasi Dasar Lengkap untuk masuk sekolah.

- Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sudah menganggarkan anggaran untuk Pembangunan RSUD Lhokseumawe. Tahun anggaran 2023 digunakan untuk biaya perencanaan dalam rangka penyiapan Detail Engenering Design (DED) Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe selalu berkoordinasi dengan BPJS terhadap kendala dalam pelayanan kesehatan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan swasta.
- Berupaya menyediakan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan yang mencukupi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
- Perlu kesepakatan penduduk sasaran dan konsistensi D.O. (lintas program)
- Perlu peningkatan pemanfaatan data SPM Kesehatan
- Perlu melakukan monitoring dan evaluasi terpadu (lintas program) di tingkat kab/kota, provinsi, dan pusat
- Perlu menyusun strategi pembinaan penyelenggaraan SPM Kesehatan, di daerah (jalur pengelola data dan pengelola program).
- Perlu merumuskan kembali target atau D.O. (khususnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin).

Hal lain yang perlu dilaporkan

Total Belanja pada Urusan Kesehatan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebesar **Rp. 99.310.097.193** (sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 90.018.280.658** (sembilan puluh milyar delapan belas juta dua

ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)
dengan capaian persentase sebesar **90,64 %**.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG) KOTA LHOKSEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
1.c.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/loa pengelolaan SD Air WS Kewenangan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	9.60	9.60

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHOKSEUMAWE**

[illegible]

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHKSEUMAWE

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota			
1.c.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	10.59	10.59
1.c.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak) 2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	15.51	15.58

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			Daerah lain.			
1.c.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T 4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 7. Kinerja penyedia layanan pelayanan SPALD S	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 	71.07	68.50

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHKSEUMAWE

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			akses dasar 8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja 13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja			
1.c.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	80.41	114.81

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota 7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat			
1.c.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 2. Panjang jalan yang dibangun 3. Panjang jembatan yang dibangun 4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 6. Panjang jalan yang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 	77.47	69.52

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			direkonstruksi/direhabilitasi 7. Panjang jembatan yang direhabilitasi 8. Panjang jalan yang dipelihara 9. Panjang jembatan yang dipelihara			
1.c.8.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN7. Tersedianya	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi &	0	0

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya⁸. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala⁹. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota¹⁰. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.¹¹.			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis¹². Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota¹³. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota¹⁴. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui¹⁵. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya¹⁶. Tersedianya data			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya ²⁴ . Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya ²⁵ . Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
1.c.8.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	0

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota 10. Tersedianya data			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. 11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis 12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analis di wilayah kab/kota 13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota 14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota 19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota 20. Jumlah badan usaha yang memiliki			

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG)
KOTA LHKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota 21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota 22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 sebesar **Rp. 17.562.927.552,00** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan beserta alokasi dan realisasi anggaran pada urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Program Kegiatan dan Anggaran serta
Realisasi anggaran pada Urusan Pekerjaan Umum

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.964.594.203,00	5.706.387.122,00	95,67 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.475.000,00	140.346.705,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.399.606.750,00	4.337.062.316,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.140.000,00	215.632.295,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.426.900,00	7.629.536,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	973.845.553,00	785.244.870,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.100.000,00	220.471.400,00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	2.661.866.000,00	2.598.841.955,00	97,63 %

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	PENYEDIAAN AIR MINUM			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.661.866.000,00	2.598.841.955,00	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.222.300.000,00	8.222.200.000,00	100 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.222.300.000,00	8.222.200.000,00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	581.200.000,00	567.570.000,00	97,65 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	581.200.000,00	567.570.000,00	
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	0,00	0,00 %
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	0,00	0,00	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	124.709.534,00	123.574.000,00	99,09 %
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	124.709.534,00	123.574.000,00	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	373.000.000,00	344.354.475,00	92,32 %
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	13.000.000,00	11.087.920,00	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	360.000.000,00	333.266.555,00	
	TOTAL	17.927.669.737,00	17.562.927.552,00	97,97

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe adalah OPD yang melaksanakan urusan wajib di Bidang Pekerjaan Umum.

Pegawai / Personil

Jumlah PNS yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat per 31 Desember 2023 berjumlah **56** orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap tahunnya dilakukan

JENIS KELAMIN			GOLONGAN				
LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	IV	III	II	I	TOTAL
42	14	56	6	39	11	0	56

dengan mengusulkan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam penyusunan RAPBK. Dimana prosesnya sejak dari tahap Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan DPA. RAPBK diajukan kepada DPRK dan dibahas sebelum disahkan menjadi APBK. Kegiatan yang disetujui dalam APBK tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Saat ini sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan memadai dan mulai tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe telah memiliki gedung kantor.

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- Perencanaan pembangunan infrastruktur perkotaan belum dilakukan secara baik, terutama berkaitan tata ruang perkotaan belum diselaraskan dengan perkembangan kota dan masyarakat;
- Belum adanya koordinasi berkelanjutan antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian target SPM. Akibatnya proses verifikasi maupun validasi data kebutuhan pelayanan dasar tidak dapat dilakukan sementara target capaian pelayanan harus ditentukan secara akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Belum adanya kepastian lahan untuk merencanakan pembangunan pada calon penerima manfaat penerapan SPM sehingga seringkali target sasaran kegiatan yang membutuhkan tidak dapat dibantu;
- Lhokseumawe tidak terlihat adanya keselarasan dan kesatuan dalam melakukan pendataan jalan – jalan yang harus di bangun dalam setiap kecamatan;
- Fasilitas pendukung yang tidak memadai dalam pelaksanaan penerapan SPM, seperti kebutuhan alat dan kendaraan untuk

- survey ke lapangan dan tidak adanya alokasi anggaran untuk penyusunan laporan SPM;
- Masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur PNS baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dalam penerapan SPM tidak terlaksana optimal; dan
 - Kegiatan yang termasuk bagian penerapan SPM muncul setelah anggaran perubahan memiliki keterbatasan waktu dalam proses pelelangan maupun penyelesaian pekerjaan.

Solusi :

- Tahun 2023 Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas PUPR telah menyelesaikan Penyusunan Revisi RTRW dan Penyusunan RDTR Kota Lhokseumawe yang akan ditetapkan sebagai Qanun RTRW dan Perwal RDTR pada Tahun 2023. Diharapkan mulai Tahun 2023, seluruh perencanaan pembangunan infrastruktur dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan mengacu pada Qanun RTRW dan Perwal RDTR Kota Lhokseumawe.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi maupun lembaga terkait dalam penentuan sasaran dan target capaian pelayanan. Sebaiknya dibentuk Tim Penerapan SPM Pekerjaan Umum pada awal tahun anggaran;
- Melakukan Survei Data Base dan Kondisi Jalan masing - masing di 4 (Empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu Dan Blang Mangat Di Wilayah Kota Lhokseumawe Untuk Memudahkan pendataan ruas – ruas jalan sesuai dengan klasifikasi jalan;
- Pemerintah perlu melakukan stimulasi terhadap target sasaran penerapan SPM yang terkendala dalam penyediaan lahan;

- Perlu adanya perhatian dari TAPK Lhokseumawe terhadap pengalokasian dana penunjang dalam penerapan SPM Pekerjaan Umum terutama terhadap 15 pengusulan penambahan fasilitas penunjang kegiatan dan penyusunan laporan SPM;
- Perlu adanya peninjauan kembali terhadap SOTK Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan kejelasan tugas pokok dan fungsi masing- masing bidang;
- Perlu adanya penambahan sumber daya Aparatur PNS yang kompeten untuk mendukung penerapan SPM, apabila tidak terpenuhi dapat mengalokasikan anggaran untuk merekrut tenaga fasilitator lapangan ataupun tenaga ahli individual khususnya kegiatan bersumber dana APBK; dan
- Perlu pengusulan anggaran dan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan hasil verifikasi kebutuhan untuk menghindari terjadinya perubahan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalokasikan anggaran pada urusan tersebut sebesar **Rp. 17.927.669.737,00** (tujuh belas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 17.562.927.552,00** (tujuh belas milyar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dengan capaian persentase sebesar **97,97 %**.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 dan 2023

berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN) KOTA LHOKEUMAWA						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
1.d.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 	0	0
1.d.2	Urusan Pemerintahan Wajib	Perumahan Rakyat dan Kawasan	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi	10.44	100

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023
(RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
KOTA LHOKSEUMAWE**

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
	Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemukiman	mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		
1.d.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha 2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur	 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani sp; 	32.44	32.44

[illegible]

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 sebesar **Rp. 10.736.543.305,00** dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Program Kegiatan dan Anggaran serta Realisasi anggaran pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.786.946.330,00	5.656.910.055,00	97,75 %
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	245.000.000,00	244.978.805,00	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.541.946.330,00	5.411.931.250,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.405.000.000,00	5.079.633.250,00	93,98 %
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.405.000.000,00	5.079.633.250,00	
TOTAL		11.191.946.330,00	10.736.543.305,00	95,93 %

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan desentralisasi di Bidang Perumahan.

Pegawai / Personil

Jumlah PNS yang berada di Dinas Pekerjaan Umum per 31 Desember 2023 berjumlah **56** orang, dengan komposisi sebagai berikut:

JENIS KELAMIN			GOLONGAN				
LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	IV	III	II	I	TOTAL
42	14	56	6	39	11	0	56

Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap tahunnya dilakukan dengan mengusulkan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam penyusunan RAPBK. Dimana prosesnya sejak dari tahap Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan DPA. RAPBK diajukan kepada DPRK dan dibahas sebelum disahkan menjadi APBK. Kegiatan yang disetujui dalam APBK tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Saat ini sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan dapat dikatakan memadai.

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

- Minimnya kebijakan anggaran infrastruktur yang berakibat pada kegiatan strategis Kota Lhokseumawe yang tidak terselesaikan;
- Belum adanya kepastian lahan untuk merencanakan pembangunan pada calon penerima manfaat penerapan SPM sehingga seringkali target sasaran kegiatan yang membutuhkan tidak dapat dibantu;
- Fasilitas pendukung yang tidak memadai dalam pelaksanaan penerapan SPM, seperti kebutuhan alat dan kendaraan untuk survey ke lapangan dan tidak adanya alokasi anggaran untuk penyusunan laporan SPM;
- Belum adanya koordinasi berkelanjutan antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti BAPPEDA, BPS dan PDAM Kota Lhokseumawe (khususnya penyediaan air minum). Akibatnya proses verifikasi maupun validasi data kebutuhan pelayanan dasar tidak dapat dilakukan sementara target capaian pelayanan harus ditentukan secara akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur PNS baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dalam penerapan SPM dilakukan oleh apartur

yang tidak sesuai dengan tupoksinya (khususnya kegiatan sumber dana DAK); dan

- Kegiatan yang termasuk bagian penerapan SPM muncul setelah anggaran perubahan memiliki keterbatasan waktu dalam proses pelelangan maupun penyelesaian pekerjaan.

Solusi :

- Tidak dilakukannya usulan/proposal kepada provinsi dan pusat dalam Rangka Dukungan Anggaran.
- Kegiatan strategis dalam wilayah kota lhokseumawe guna mewujudkan Kota Lhokseumawe sebagai pusat kegiatan strategis nasional (PKSN).
- Pemerintah perlu melakukan stimulasi terhadap target sasaran penerapan SPM yang terkendala dalam penyediaan lahan terutama mengenai pembangunan rumah layak huni untuk kaum dhuafa;
- Perlu adanya perhatian dari TAPK Lhokseumawe terhadap pengalokasian dana penunjang dalam penerapan SPM terutama terhadap pengusulan penambahan fasilitas penunjang kegiatan dan penyusunan laporan SPM;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi maupun lembaga terkait dalam penentuan sasaran dan target capaian pelayanan. Sebaiknya dibentuk Tim Penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada awal tahun anggaran;
- Perlu adanya peninjauan kembali terhadap SOTK Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan kejelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang;
- Perlu adanya penambahan sumber daya Aparatur PNS yang kompeten untuk mendukung penerapan SPM, apabila tidak terpenuhi dapat mengalokasikan anggaran untuk merekrut tenaga

fasilitator lapangan ataupun tenaga ahli individual khususnya kegiatan bersumber dana APBK; dan

- Perlu pengusulan anggaran dan kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan hasil verifikasi kebutuhan untuk menghindari terjadinya perubahan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Pada Urusan Perumahan Pemerintah Kota Lhokseumawe menganggarkan anggaran pada urusan tersebut sebesar **Rp. 11.191.946.330,00** (sebelas milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 10.736.543.305,00** (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah) dengan capaian persentase sebesar **95.93%**.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (KETENTRAMAN, KETERTIBAN, UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT) KOTA LHOKSEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
1.e.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat	100	100

KOTA LHOKSEUMAWE**RLPPD Kota Lhokseumawe Tahun 2023**

**PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (KETENTRAMAN,
KETERTIBAN, UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT)**

KOTA LHOKSEUMAWE

No. IKK	Kategori Urutan	Urutan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
	Dasar		sah/legal2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal3. Persentase jumlah aparaturn dan warga negara yang ikut pelatihan4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	kesiapsiagaan terhadap bencana		
1.e.5	Urutan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana 4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (KETENTRAMAN, KETERTIBAN, UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

KOTA LHOKSEUMAWE

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			bencana			
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota 2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan 3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan 4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa 5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi 6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar	 ; Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ; ; ; ; ;	32.25	100

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (KETENTRAMAN, KETERTIBAN, UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT) KOTA LHOXSEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran 7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran 8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran			
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	15

B. Realisasi Belanja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 pada BPBD Kota Lhokseumawe sebesar **4.980.424.955,00** dan pada

SATPOL PP dan WH Kota Lhokseumawe sebesar **11.284.968.372,00**, dengan program/kegiatan unggulan di bawah sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.191.626.680,00	4.851.060.060,00	93,44
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.975.000,00	14.974.990,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.216.013.445,00	2.122.401.170,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.000.000,00	29.750.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	473.940.000,00	418.390.140,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.748.260,00	103.320.560,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.951.749.975,00	1.776.646.007,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.200.000,00	385.577.193,00	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	160.000.000,00	129.364.895,00	80,85
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.999.640,00	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	55.000.000,00	30.569.300,00	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	33.795.955,00	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	0,00	0,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
TOTAL		5.351.626.680,00	4.980.424.955,00	93,06
KANTOR SATPOL PP DAN WH				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,302,156,879.00	8,145,710,102.00	98,12 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,162,500.00	11,358,545.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,296,914,500.00	4,190,543,742.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	914,840,000.00	905,208,100.00	

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134,140,000.00	133,939,034.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22,800.00	0.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,433,577,079.00	2,403,072,724.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507,500,000.00	501,587,957.00	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,178,544,589.00	3,139,258,270.00	98,76 %
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	322,546,469.00	306,800,670.00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15,300,000.00	15,297,600.00	
	Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	2,840,698,120.00	2,817,160,000.00	
TOTAL		11.480.701.468,00	11.284.968.372,00	98,30

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe tidak ditemukan permasalahan yang berarti. Akan tetapi, terdapat banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketiadaan anggaran, serta kegiatan yang telah dilaksanakan juga tidak dapat dilakukan secara maksimal karena anggaran yang minim atau tidak memadai. Guna memaksimalkan kegiatan, yang dapat dilakukan oleh BPBD adalah berkolaborasi dengan instansi/lembaga pemerintahan dan/atau non pemerintahan lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Permasalahan

- Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli wilayah se Kota Lhokseumawe
- Jumlah PPNS dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe yang minim/kurang memadai.
- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan uqubat cambuk yang harus segera dilaksanakan setelah adanya putusan dari Mahkamah Syar'iah.
- Kurangnya anggota Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengikuti pendidikan dasar (Diklat) yang merupakan peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dalam membentuk perilaku Satpol PP, meningkatkan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketentraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan serta perlindungan masyarakat

- Kurangnya biaya operasional yang memadai, seperti dana resiko kerja yang sangat dibutuhkan dan uang siaga oleh anggota Satpol PP Dan WH.

Solusi

- Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak Pemerintah Kota Lhokseumawe maupun Pemerintah Provinsi/Pusat melalui bantuan keuangan/hibah.
- Merencanakan Penambahan personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe untuk mengikuti pendidikan PPNS.
- Merencanakan untuk anggaran eksekusi cambuk dapat ditingkatkan dan pelaksanaan dapat dilaksanakan minimal 6 kali dalam setahun, sehingga penegakan perundang-undangan daerah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan akan mendapat efek jera.
- Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendidikan dasar kepada anggota Polisi Pamong Praja sehingga menjalani tugas dan fungsinya dengan baik.

Dana Resiko kerja dan siaga sangat dibutuhkan oleh personil mengingat resiko dalam melaksanakan tugas Satpol PP banyak menghadapi permasalahan yang membahayakan petugas sangat diperlukan. Dan dana siaga sangat dibutuhkan dalam menunjang tugas sehari-hari.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 dan 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (URUSAN SOSIAL) KOTA LHOKSEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
1.f.1	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1. Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM3. JumlahTimReaksi Cepat yang dibentuk4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi7. Jumlahrumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar8. Jumlah penyandang	 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (URUSAN SOSIAL) KOTA LHOKEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat			

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (URUSAN SOSIAL) KOTA LHOKESEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			kesejahteraan sosial16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk			
1.f.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	100	100

PELAPORAN IKK OUTCOME TAHUN 2023 (URUSAN SOSIAL) KOTA LHOKSEUMAWE						
No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome	CAPAIAN	
					2022	2023
			3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4. Jumlah paket permakanaan khusus bagi kelompok rentan 5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota bsp; 		

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,071,913,707.00	3,023,434,155.00	98,42 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,700,000.00	15,683,380.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,520,758,400.00	2,493,381,524.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109,140,000.00	108,870,355.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	0.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325,715,307.00	307,360,896.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,600,000.00	98,138,000.00	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2,105,382,000.00	1,965,457,085.00	93,35 %
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2,105,382,000.00	1,965,457,085.00	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	866,300,000.00	851,941,878.00	98,34 %
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	866,300,000.00	851,941,878.00	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0.00	0.00	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0.00	0.00	0 %

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	0.00	0.00	
TOTAL		6.043.595.707,00	5.840.833.118,00	96,65 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe adalah OPD yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan di bidang Sosial.

Pegawai / Personil

Jumlah PNS yang ada pada Dinas Sosial per 31 Desember 2023 berjumlah **28** orang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

JENIS KELAMIN			GOLONGAN				
LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	IV	III	II	I	TOTAL
13	15	28	3	22	3	-	28

Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Sosial setiap tahunnya dilakukan dengan mengusulkan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam penyusunan RAPBK. Dimana prosesnya sejak dari tahap Musrenbang, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan DPA. RAPBK diajukan kepada DPRK dan dibahas sebelum disahkan menjadi APBK. Kegiatan yang disetujui dalam APBK tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Pada saat ini sarana dan prasarana yang ada pada Dinsosnaker Kota Lhokseumawe dapat dikatakan sudah memadai, namun belum adanya bangunan gedung kantor mengakibatkan sejumlah arsip

tidak tertata dengan baik dan juga masih kurangnya kendaraan roda dua untuk operasional ke desa-desa.

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Permasalahan

- Masih ditemukan adanya penyaluran bantuan yang tumpang tindih atau tidak tepat sasaran.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Tenaga Profesional di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- Belum tersedianya Panti Rehabilitasi Penampungan dan Pembinaan Milik Pemerintah untuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama untuk Para Tuna Sosial Gelandangan Pengemis dan Anak Terlantar yang berasal dari luar kota lhokseumawe.
- Masih Kurang Akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data acuan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan.

Solusi

- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosial serta terus melakukan Koordinasi dengan Pihak BKPSDM untuk menyediakan Formasi Tenaga Teknis Kesejahteraan Sosial.
- Melakukan Koordinasi dan Kerja sama dengan para Pimpinan Lembaga Sosial Kesejahteraan Anak (LKSA) dan Panti Jompo yang ada di Wilayah Kota Lhokseumawe untuk dilakukan

Penampungan Sementara, serta terus melakukan Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, melakukan penelusuran Keluarga para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama untuk Para Tuna Sosial Gelandangan Pengemis dan Anak Terlantar agar dapat dikembalikan ke pihak keluarga.

- Melakukan **Verifikasi data** sebagai proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan dan melakukan proses **validasi data** sebagai pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
- Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana yang ada dalam poses pelaksanaan Kegiatan di Lapangan.

Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

Pada Urusan Sosial Pemerintah Kota Lhokseumawe mengalokasikan anggaran pada urusan tersebut sebesar **Rp. 6.043.595.707,00** (enam milyar empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 5.840.833.118,00** (lima milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah) dengan capaian persentase sebesar **96,65%**.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya

Dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu untuk 3

Kabupaten dengan status sedang, 19 Kabupaten/Kota dengan status rendah, dan 1 Kabupaten dengan status sangat rendah, Kota Lhokseumawe sendiri berstatus rendah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Kota Lhokseumawe berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 2,3546 dan status kinerja Rendah.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Nomor 24.A/LHP/XVIII.BAC/05/2023 Kota Lhokseumawe berhasil mendapatkan WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 yang berarti Wajar Tanpa Pengecualian.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe Tahun 2023 Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 mencapai sebesar **748.760.268.324,63** dan Realisasi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 mencapai **720.820.494.369,00**.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	768.471.407.647	748.760.268.324,63	97,44	789.566.096.079,52
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.120.033.625	68.047.614.286,63	90,59	68.212.506.871,28
4.1.01	Pajak Daerah	34.060.750.000	39.586.883.419,00	116,22	40.032.463.309,91

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
4.1.01.06	Pajak Hotel	450.000.000	744.194.756,00	165,38	534.054.623,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	400.000.000	609.746.765,00	152,44	411.385.976,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	400.000.000	609.746.765,00	152,44	411.385.976,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	50.000.000	134.447.991,00	268,90	122.668.647,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	50.000.000	134.447.991,00	268,90	122.668.647,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.755.000.000	6.139.818.064,00	163,51	5.563.411.570,91
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.500.000.000	5.952.079.364,00	170,06	5.381.067.486,91
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.500.000.000	5.952.079.364,00	170,06	5.381.067.486,91
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	255.000.000	187.738.700,00	73,62	182.344.084,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	255.000.000	187.738.700,00	73,62	182.344.084,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	170.000.000	348.147.200,00	204,79	218.205.800,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	170.000.000	348.147.200,00	204,79	218.205.800,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	170.000.000	348.147.200,00	204,79	218.205.800,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	686.250.000	707.298.992,00	103,07	812.722.786,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	450.000.000	500.982.763,00	111,33	618.404.374,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	450.000.000	500.982.763,00	111,33	618.404.374,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	140.000.000	87.616.575,00	62,58	106.379.494,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	140.000.000	87.616.575,00	62,58	106.379.494,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	7.500.000	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	7.500.000	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	3.750.000	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	3.750.000	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	15.000.000	40.582.629,00	270,55	15.585.165,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	15.000.000	40.582.629,00	270,55	15.585.165,00
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	70.000.000	78.117.025,00	111,60	72.353.753,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	70.000.000	78.117.025,00	111,60	72.353.753,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	17.005.000.000	17.869.554.495,00	105,08	16.966.472.464,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	16.130.000.000	16.995.087.495,00	105,36	16.092.005.464,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	16.130.000.000	16.995.087.495,00	105,36	16.092.005.464,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	875.000.000	874.467.000,00	99,94	874.467.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	875.000.000	874.467.000,00	99,94	874.467.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	40.000.000	41.827.000,00	104,57	36.825.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	40.000.000	41.827.000,00	104,57	36.825.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	40.000.000	41.827.000,00	104,57	36.825.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	67.000.000	75.070.521,00	112,05	58.095.336,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	67.000.000	75.070.521,00	112,05	58.095.336,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	67.000.000	75.070.521,00	112,05	58.095.336,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.012.500.000	183.405.503,00	18,11	399.218.193,00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	22.500.000	12.243.264,00	54,41	53.470.858,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	22.500.000	12.243.264,00	54,41	53.470.858,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	660.000.000	102.985.022,00	15,60	202.934.836,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	660.000.000	102.985.022,00	15,60	202.934.836,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	307.500.000	55.909.761,00	18,18	116.266.205,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	307.500.000	55.909.761,00	18,18	116.266.205,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	22.500.000	12.267.456,00	54,52	26.546.294,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	22.500.000	12.267.456,00	54,52	26.546.294,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000	6.468.161.897,00	117,60	6.118.917.274,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.500.000.000	6.468.161.897,00	117,60	6.118.917.274,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.500.000.000	6.468.161.897,00	117,60	6.118.917.274,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.375.000.000	7.009.404.991,00	130,41	9.324.540.263,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.375.000.000	7.009.404.991,00	130,41	9.324.540.263,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.375.000.000	7.009.404.991,00	130,41	9.324.540.263,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.087.500.000	3.733.420.512,40	91,34	3.022.508.323,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.601.000.000	3.025.068.012,40	84,01	2.540.668.823,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	403.229.106,40	0,00	0,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0	403.229.106,40	0,00	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000	370.105.000,00	37,01	464.260.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.000.000.000	370.105.000,00	37,01	464.260.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	835.000.000	764.948.000,00	91,61	723.300.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	835.000.000	764.948.000,00	91,61	723.300.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.156.000.000	922.465.000,00	79,80	708.311.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	580.000.000	359.300.000,00	61,95	296.100.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	320.000.000	410.665.000,00	128,33	347.211.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	256.000.000	152.500.000,00	59,57	65.000.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	180.000.000	90.665.000,00	50,37	181.703.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	180.000.000	90.665.000,00	50,37	181.703.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000	12.535.000,00	125,35	11.323.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	10.000.000	12.535.000,00	125,35	11.323.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	420.000.000	461.120.906,00	109,79	451.771.823,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	420.000.000	461.120.906,00	109,79	451.771.823,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	86.500.000	87.165.000,00	100,77	66.152.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	86.500.000	87.165.000,00	100,77	66.152.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	38.500.000	29.415.000,00	76,40	0,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	48.000.000	57.750.000,00	120,31	41.400.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0	0,00	0,00	24.752.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000	621.187.500,00	155,30	415.687.500,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000	621.187.500,00	155,30	415.687.500,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000	621.187.500,00	155,30	415.687.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000	3.236.124.545,00	62,23	4.350.084.432,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.200.000.000	3.236.124.545,00	62,23	4.350.084.432,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.200.000.000	3.236.124.545,00	77,05	3.465.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga	4.200.000.000	3.236.124.545,00	77,05	3.465.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Keuangan)				
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.000.000.000	0,00	0,00	885.084.432,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.000.000.000	0,00	0,00	885.084.432,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	31.771.783.625	21.491.185.810,23	67,64	20.807.450.806,37
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	3.000.000,00	0,00	305.992.800,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	297.992.800,00
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0	0,00	0,00	297.992.800,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	25.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	0	25.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	0	25.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	400.000.000	33.312.891,21	8,33	49.618.442,62
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000	33.312.891,21	8,33	49.618.442,62
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	400.000.000	33.312.891,21	8,33	49.618.442,62
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.100.000.000	750.735.412,71	18,31	2.571.044.396,92
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.100.000.000	750.735.412,71	18,31	2.571.044.396,92
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.100.000.000	750.735.412,71	18,31	2.571.044.396,92
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	93.556.555,10	0,00	0,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	93.556.555,10	0,00	0,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	93.556.555,10	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	4.202.400,00	0,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	0	4.202.400,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Pekerjaan				
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	4.202.400,00	0,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	110.000.000	296.763.079,00	269,78	216.373.036,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	35.036,00	0,00	0,00
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	0	35.036,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0	373.322,00	0,00	609.260,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	106.666,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0	266.656,00	0,00	609.260,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	93.159,00	0,00	25.460,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	93.159,00	0,00	25.460,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	110.000.000	296.261.562,00	269,33	215.738.316,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	110.000.000	296.261.562,00	269,33	215.738.316,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	19.954.000,00	0,00	0,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0	19.954.000,00	0,00	0,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0	19.954.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.211.242.617	2.316.061.390,98	104,74	0,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	3.351.382,00	0,00	0,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	3.351.382,00	0,00	0,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	86.002.214	90.574.898,00	105,32	0,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	86.002.214	90.574.898,00	105,32	0,00
4.1.04.15.05	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0	90.443,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
4.1.04.15.05.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK	0	90.443,00	0,00	0,00
4.1.04.15.06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)	0	271.313,00	0,00	0,00
4.1.04.15.06.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM	0	271.313,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	30.683.128	41.089.385,75	133,92	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	30.683.128	41.089.385,75	133,92	0,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.000.000	74.453.541,00	1.861,34	0,00
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.000.000	74.453.541,00	1.861,34	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0	56.918.160,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	56.918.160,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	205.324.850	132.724.350,00	64,64	0,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	205.324.850	132.724.350,00	64,64	0,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	102.952.245	129.363.722,25	125,65	0,00
4.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	20.822.722	28.233.722,25	135,59	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
4.1.04.15.17.0562	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	82.129.523	101.130.000,00	123,13	0,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40.248.757	38.182.681,83	94,87	0,00
4.1.04.15.34.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	40.248.757	38.182.681,83	94,87	0,00
4.1.04.15.38	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	15.524.350	19.524.350,83	125,77	0,00
4.1.04.15.38.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	15.524.350	19.524.350,83	125,77	0,00
4.1.04.15.48	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	7.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.48.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0	7.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.60	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	0	25.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.60.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	0	25.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-	239.871.489	99.358.128,85	41,42	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Bangunan Gedung				
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	38.812.338	19.699.128,85	50,75	0,00
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0	3.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	16.659.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	201.059.151	60.000.000,00	29,84	0,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	885.229.324	908.328.297,00	102,61	0,00
4.1.04.15.65.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	865.326.766	884.424.745,44	102,21	0,00
4.1.04.15.65.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	19.902.558	23.903.551,56	120,10	0,00
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	601.406.260	626.606.515,52	104,19	0,00
4.1.04.15.66.0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	600.585.405	625.585.660,10	104,16	0,00
4.1.04.15.66.0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	820.855	1.020.855,42	124,36	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
4.1.04.15.68	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0	62.724.221,95	0,00	0,00
4.1.04.15.68.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	0	62.724.221,95	0,00	0,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	13.050.609.547	11.105.654.885,00	85,10	9.398.580.825,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.050.609.547	11.105.654.885,00	85,10	9.398.580.825,00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.050.609.547	11.105.654.885,00	85,10	9.398.580.825,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.999.931.461	116.445.000,00	3,88	1.261.646.070,83
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.999.931.461	116.445.000,00	3,88	1.261.646.070,83
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.999.931.461	116.445.000,00	3,88	1.261.646.070,83
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	8.900.000.000	6.726.500.196,23	75,58	7.004.195.235,00
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	8.900.000.000	6.726.500.196,23	75,58	7.004.195.235,00
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	7.000.000.000	5.617.168.562,12	80,25	5.571.203.482,00
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	1.900.000.000	1.109.331.634,11	58,39	1.432.991.753,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.120.033.625	68.047.614.286,63	90,59	68.212.506.871,28
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	692.811.374.022	680.490.654.038,00	98,22	721.353.589.208,24
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	631.695.343.383	623.571.392.268,00	98,71	622.773.568.549,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	564.137.641.383	556.439.573.013,00	98,64	534.428.367.647,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	25.268.064.383	25.249.350.413,00	99,93	25.508.814.157,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.336.892.465	4.336.892.465,00	100,00	10.074.254.921,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	10.177.214.464	9.996.400.464,00	98,22	9.216.469.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	17.386.642	198.200.642,00	1.139,96	140.555.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	438.877.524	420.163.554,00	95,74	235.304.424,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	703.973.965	388.815.965,00	55,23	401.045.196,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	33.144.170	348.302.170,00	1.050,87	377.533.157,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Gas Bumi				
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	10.393.913	10.393.913,00	100,00	22.868.119,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.779.200.351	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0	2.779.200.351,00	0,00	3.063.068.444,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0	16.153.678,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	16.153.678	0,00	0,00	19.404.896,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	5.195.684.000	5.195.684.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.559.143.211	1.559.143.211,00	100,00	1.958.311.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	433.613.526.000	436.369.459.000,00	100,64	415.683.229.737,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	433.613.526.000	415.691.179.000,00	95,87	415.683.229.737,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0	20.678.280.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	23.192.612.000	22.632.985.556,00	97,59	33.292.658.226,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	453.293.000	450.092.030,00	99,29	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.891.631.000	2.779.219.618,00	96,11	6.995.685.150,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.742.808.000	6.429.059.422,00	95,35	4.783.851.651,00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0	0,00	0,00	2.237.622.728,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.256.521.000	2.234.956.850,00	99,04	0,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0	0,00	0,00	1.748.860.750,00
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0	0,00	0,00	1.334.869.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	0	0,00	0,00	2.884.372.827,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0	0,00	0,00	1.916.784.400,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0	0,00	0,00	4.084.008.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	8.686.083.000	2.600.114.900,00	29,93	5.078.897.000,00
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0	6.080.258.100,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0	0,00	0,00	289.768.249,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	322.499.000	301.137.000,00	93,38	0,00
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0	0,00	0,00	1.115.381.326,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0	0,00	0,00	276.224.050,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	301.799.000	299.850.000,00	99,35	546.333.095,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.537.978.000	1.458.297.636,00	94,82	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.063.439.000	72.187.778.044,00	87,97	59.943.665.527,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	24.986.400.000	20.974.400.000,00	83,94	20.976.485.683,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.135.000.000	822.500.000,00	72,47	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	35.629.788.000	34.707.045.035,00	97,41	31.057.300.180,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.053.000.000	1.028.132.891,00	97,64	684.499.250,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.862.950.000	187.880.000,00	6,56	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	474.540.000	119.550.000,00	25,19	0,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000	700.000.000,00	100,00	610.510.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.206.909.000	4.429.955.740,00	85,08	3.112.931.500,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	6.104.723.000	6.104.723.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.217.484.000	1.608.916.228,00	72,56	1.685.101.124,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	471.370.000	453.272.200,00	96,16	388.645.180,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	438.200.000	370.477.000,00	84,55	352.095.010,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	598.000.000	510.275.350,00	85,33	451.800.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	185.075.000	170.650.600,00	92,21	624.297.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	564.137.641.383	556.439.573.013,00	98,64	534.428.367.647,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.730.566.000	5.730.566.000,00	100,00	34.445.081.000,00
4.2.01.02.01	DID	5.730.566.000	5.730.566.000,00	100,00	34.445.081.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	5.730.566.000	5.730.566.000,00	100,00	34.445.081.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	61.827.136.000	61.401.253.255,00	99,31	53.900.119.902,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	61.827.136.000	61.401.253.255,00	99,31	53.900.119.902,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	61.827.136.000	61.401.253.255,00	99,31	53.900.119.902,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	67.557.702.000	67.131.819.255,00	99,37	88.345.200.902,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.116.030.639	56.919.261.770,00	93,13	98.580.020.659,24
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	31.220.106.455	34.250.277.597,00	109,71	29.261.429.715,29
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.220.106.455	34.250.277.597,00	109,71	29.261.429.715,29
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.410.408.672	6.429.103.465,00	86,76	6.095.171.830,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.296.883.848	3.709.563.527,00	112,52	3.365.616.576,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.408.137.224	12.554.518.767,00	149,31	10.225.153.363,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	72.389.343	76.231.954,00	105,31	83.204.173,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.032.287.368	11.480.859.884,00	95,42	9.492.283.773,29
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	29.895.924.184	22.668.984.173,00	75,83	69.318.590.943,95
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	29.895.924.184	22.668.984.173,00	75,83	69.318.590.943,95
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	29.895.924.184	22.668.984.173,00	75,83	69.318.590.943,95
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	61.116.030.639	56.919.261.770,00	93,13	98.580.020.659,24

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	692.811.374.022	680.490.654.038,00	98,22	721.353.589.208,24
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	540.000.000	222.000.000,00	41,11	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	540.000.000	222.000.000,00	41,11	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	540.000.000	222.000.000,00	41,11	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	540.000.000	222.000.000,00	41,11	0,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	540.000.000	222.000.000,00	41,11	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	540.000.000	222.000.000,00	41,11	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	768.471.407.647	748.760.268.324,63	97,44	789.566.096.079,52
5	BELANJA DAERAH	798.260.907.647	720.820.494.369,00	90,30	825.509.672.418,00
5.1	BELANJA OPERASI	595.256.623.128	540.869.018.366,00	90,86	576.374.939.708,00
5.1.01	Belanja Pegawai	333.590.854.673	316.584.344.048,00	94,90	304.916.122.038,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	242.391.791.063	230.967.239.418,00	95,29	222.258.123.419,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	181.556.260.622	174.362.013.043,00	96,04	167.864.716.955,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	158.335.742.872	157.109.113.687,00	99,23	159.985.852.055,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	23.220.517.750	17.252.899.356,00	74,30	7.878.864.900,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.922.161.374	15.413.510.186,00	91,08	15.046.753.259,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.097.329.374	13.950.226.718,00	98,96	14.368.067.515,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.824.832.000	1.463.283.468,00	51,80	678.685.744,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.780.062.200	8.226.460.000,00	93,69	7.829.530.554,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.329.423.200	7.143.305.000,00	97,46	7.334.600.554,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1.450.639.000	1.083.155.000,00	74,67	494.930.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.061.011.950	5.981.675.000,00	98,69	6.237.743.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.061.011.950	5.981.675.000,00	98,69	6.237.743.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.807.464.000	4.783.062.000,00	99,49	5.060.040.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.807.464.000	4.783.062.000,00	99,49	5.060.040.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.675.713.876	9.693.779.096,00	90,80	9.323.495.620,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.663.372.876	8.559.464.636,00	98,80	8.804.968.420,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.012.341.000	1.134.314.460,00	56,37	518.527.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	989.816.502	942.144.431,00	95,18	559.542.108,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	989.816.502	942.144.431,00	95,18	559.542.108,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.177.858	2.465.446,00	59,01	2.521.024,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.475.858	2.174.960,00	62,57	2.393.085,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	702.000	290.486,00	41,38	127.939,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.574.975.512	10.124.908.229,00	95,74	8.951.651.373,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.579.826.512	9.419.136.780,00	98,32	8.691.941.866,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	995.149.000	705.771.449,00	70,92	259.709.507,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	382.858.469	358.567.099,00	93,66	345.532.310,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	331.056.469	321.687.410,00	97,17	330.460.212,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	51.802.000	36.879.689,00	71,19	15.072.098,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.153.377.800	1.078.654.888,00	93,52	1.036.597.216,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	992.083.800	968.019.927,00	97,57	985.573.606,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	161.294.000	110.634.961,00	68,59	51.023.610,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	483.910.900	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	353.613.900	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	130.297.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	37.437.196.972	36.150.532.070,00	96,56	30.145.700.746,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.719.793.388	5.515.060.006,00	96,42	3.882.175.930,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.719.793.388	5.515.060.006,00	96,42	3.882.175.930,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	19.500.000	19.500.000,00	100,00	14.250.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	19.500.000	19.500.000,00	100,00	14.250.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	31.697.903.584	30.615.972.064,00	96,59	26.249.274.816,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	31.697.903.584	30.615.972.064,00	96,59	26.249.274.816,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.975.005.638	39.522.522.729,00	91,97	43.101.866.254,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	965.535.000	448.505.008,00	46,45	1.707.200.000,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	22.500.000	9.000.000,00	40,00	16.500.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	96.437.500	75.100.000,00	77,87	249.250.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	8.500.000	3.400.000,00	40,00	10.250.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	34.312.500	13.725.000,00	40,00	36.400.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	204.060.000	127.640.008,00	62,55	808.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.000.000	800.000,00	40,00	800.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.350.000	1.340.000,00	40,00	1.300.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.625.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	275.000.000	110.000.000,00	40,00	174.700.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	268.750.000	107.500.000,00	40,00	410.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	196.075.000	22.262.500,00	11,35	81.950.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.000.000	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	41.750.000	6.262.500,00	15,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	40.000.000	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	8.825.000	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21.000.000	8.000.000,00	38,10	15.750.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	4.500.000	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	30.000.000	8.000.000,00	26,67	20.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	35.629.788.000	33.410.716.400,00	93,77	33.981.386.735,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	35.629.788.000	33.410.716.400,00	93,77	33.981.386.735,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.053.000.000	867.750.000,00	82,41	629.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.053.000.000	867.750.000,00	82,41	629.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0,00	0,00	1.569.047.260,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0,00	0,00	1.569.047.260,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.066.407.638	4.725.438.821,00	93,27	4.934.082.259,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.877.900.000	4.555.225.000,00	93,38	4.546.480.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	108.167.638	101.033.821,00	93,40	380.952.259,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	80.340.000	69.180.000,00	86,11	6.650.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	64.200.000	47.850.000,00	74,53	199.200.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	64.200.000	47.850.000,00	74,53	199.200.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.006.473.000	9.433.238.631,00	94,27	8.773.361.485,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	556.815.000,00	99,16	556.815.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	556.815.000,00	99,16	556.815.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.222.000	63.124.000,00	99,84	62.055.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.222.000	63.124.000,00	99,84	62.055.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	84.153.000	83.138.160,00	98,79	83.500.260,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	84.153.000	83.138.160,00	98,79	83.500.260,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000	47.659.500,00	99,02	47.659.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000	47.659.500,00	99,02	47.659.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	802.613.000	802.053.000,00	99,93	792.461.250,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	802.613.000	802.053.000,00	99,93	792.461.250,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.062.000	70.857.150,00	80,46	86.828.175,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	88.062.000	70.857.150,00	80,46	86.828.175,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	79.645.000	6.379.275,00	8,01	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	79.645.000	6.379.275,00	8,01	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000	1.871.100.000,00	99,00	1.871.100.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000	1.871.100.000,00	99,00	1.871.100.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000	472.500.000,00	60,00	466.200.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000	472.500.000,00	60,00	466.200.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	246.573.000	244.504.214,00	99,16	244.397.878,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	246.573.000	244.504.214,00	99,16	244.397.878,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	2.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.508.159.000	2.465.308.332,00	98,29	2.464.894.422,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	67.537.000	48.733.020,00	72,16	48.319.110,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.622.000	4.575.312,00	98,99	4.575.312,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.436.000.000	2.412.000.000,00	99,01	2.412.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.772.000.000	2.743.500.000,00	98,97	2.088.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.772.000.000	2.743.500.000,00	98,97	2.088.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	72.374.000	6.300.000,00	8,70	9.450.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	72.374.000	6.300.000,00	8,70	9.450.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	178.788.000	3.931.200,00	2,20	130.190.134,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.961.000	0,00	0,00	35.100.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.961.000	0,00	0,00	35.100.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.318.000	0,00	0,00	4.590.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.318.000	0,00	0,00	4.590.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.729.000	3.931.200,00	3,90	82.382.400,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.729.000	3.931.200,00	3,90	82.382.400,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.275.000	0,00	0,00	3.548.580,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.275.000	0,00	0,00	3.548.580,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.417.000	0,00	0,00	803.154,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.417.000	0,00	0,00	803.154,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000	0,00	0,00	1.120,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.000	0,00	0,00	1.120,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.623.000	0,00	0,00	3.502.800,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.623.000	0,00	0,00	3.502.800,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.000	0,00	0,00	65.520,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	116.000	0,00	0,00	65.520,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	346.000	0,00	0,00	196.560,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	346.000	0,00	0,00	196.560,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000	506.880.000,00	84,26	506.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000	110.880.000,00	55,00	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000	110.880.000,00	55,00	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	396.000.000,00	99,00	396.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	396.000.000,00	99,00	396.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.420.544.061	177.507.014.701,00	89,46	185.425.254.292,00
5.1.02.01	Belanja Barang	43.934.204.536	38.018.628.219,00	86,54	39.271.576.217,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	43.934.204.536	38.018.628.219,00	86,54	39.212.767.217,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.515.641	10.512.000,00	99,97	68.721.880,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	23.344.700	22.800.000,00	97,67	61.174.235,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.677.040.636	5.104.545.805,00	89,92	4.807.529.563,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	63.852.921	63.659.801,00	99,70	502.637.300,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0	0,00	0,00	121.708.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0	0,00	0,00	221.762.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.883.312	1.483.312,00	38,20	646.743.095,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.496.388	18.166.250,00	98,22	206.795.439,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0	0,00	0,00	13.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.736.936.938	4.114.295.685,00	86,86	4.832.639.940,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.736.010.000	2.947.453.420,00	78,89	3.369.053.150,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	118.039.214	111.279.500,00	94,27	185.955.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	15.011.509	8.611.320,00	57,36	100.357.900,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	94.048.170	92.936.600,00	98,82	118.203.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	850.596.365	779.816.532,00	91,68	643.844.573,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	17.100.000	16.620.000,00	97,19	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.500.000	4.500.000,00	100,00	91.354.418,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	275.372.000	272.385.000,00	98,92	117.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	925.937.985	834.391.368,00	90,11	1.296.212.387,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.301.867.674	1.733.472.820,00	75,31	2.540.249.328,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.593.624.587	2.967.660.867,00	82,58	183.780.531,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.226.288.800	1.990.231.420,00	89,40	2.507.609.700,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0,00	0,00	958.328.798,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	626.603.871	540.515.900,00	86,26	881.447.280,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.373.579.713	7.060.482.748,00	84,32	7.498.716.600,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	818.737.369	768.035.000,00	93,81	906.495.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.144.757.500	2.606.143.017,00	82,87	239.080.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.091.980.043	3.805.745.342,00	93,00	3.919.855.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000	134.992.650,00	99,99	137.445.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	5.000.000	5.000.000,00	100,00	27.400.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	373.095.000	364.057.430,00	97,58	357.007.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.011.795.000	991.455.000,00	97,99	509.952.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	133.262.000	119.501.207,00	89,67	95.920.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0	0,00	0,00	53.800.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	99.250.000	99.250.000,00	100,00	32.500.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	38.000.000	37.975.000,00	99,93	68.350.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	0,00	0,00	10.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	204.927.200	204.927.200,00	100,00	631.832.700,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	82.250.000	82.226.025,00	99,97	82.145.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	103.500.000	103.500.000,00	100,00	164.560.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0	0,00	0,00	58.809.000,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0	0,00	0,00	58.809.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	97.955.702.802	87.120.719.812,00	88,94	86.822.545.406,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	86.100.716.033	77.230.790.496,00	89,70	75.387.140.692,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.161.250.000	1.466.150.000,00	67,84	1.382.332.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.516.130.000	1.265.570.850,00	83,47	2.037.135.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	106.800.000	32.700.000,00	30,62	91.800.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.052.600.000	852.170.000,00	80,96	763.675.029,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	42.000.000	2.400.000,00	5,71	27.300.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0	0,00	0,00	1.350.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	489.600.000	429.200.000,00	87,66	456.300.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0	0,00	0,00	9.339.310.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.243.685.078	8.064.884.078,00	78,73	7.134.379.249,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	4.884.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	94.400.000	53.400.000,00	56,57	384.900.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	285.400.000	275.600.000,00	96,57	252.600.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	38.600.000	38.565.000,00	99,91	1.099.735.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	21.000.000	0,00	0,00	57.416.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0	0,00	0,00	593.900.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.400.000	2.400.000,00	100,00	78.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.814.010.000	32.032.850.000,00	92,01	10.032.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	45.200.000	36.800.000,00	81,42	21.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	314.400.000	286.550.000,00	91,14	3.247.869.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.139.910.800	4.526.560.800,00	88,07	3.433.175.800,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	317.175.000	297.775.000,00	93,88	7.602.660.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	229.900.000	205.700.000,00	89,47	3.035.820.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	600.000	600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	27.152.000	25.136.000,00	92,58	2.134.540.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6.750.000	6.750.000,00	100,00	122.950.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	224.900.000	216.850.000,00	96,42	261.500.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	36.820.000	36.820.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0	0,00	0,00	23.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	543.400.000	525.904.500,00	96,78	49.117.374,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	916.955.000	871.455.000,00	95,04	545.735.100,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	50.000.000	50.000.000,00	100,00	95.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	34.300.000	34.300.000,00	100,00	48.975.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	344.000.000	318.757.210,00	92,66	69.296.370,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	109.000.000	53.286.500,00	48,89	70.756.182,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	12.508.964	12.480.000,00	99,77	70.870.900,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	3.042.700.000	2.967.660.400,00	97,53	2.662.385.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	167.764.000	85.364.147,00	50,88	139.567.437,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	83.440.000	47.517.122,00	56,95	32.407.240,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.416.110.393	20.275.243.597,00	94,67	15.783.898.205,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	228.000.000	227.261.000,00	99,68	239.203.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja	1.611.705.738	1.347.909.632,00	83,63	1.478.861.306,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	139.099.060	131.184.660,00	94,31	189.120.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	50.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	8.856.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	125.000.000	124.725.000,00	99,78	0,00
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0	0,00	0,00	291.300.000,00
5.1.02.02.01.0076	Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	2.310.000	2.310.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.544.031.935	1.208.083.938,00	78,24	1.248.883.572,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.452.031.935	1.128.340.938,00	77,71	1.172.254.572,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	81.000.000	79.743.000,00	98,45	76.629.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	11.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	271.625.000	270.450.000,00	99,57	150.625.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	271.625.000	270.450.000,00	99,57	150.625.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.374.125.000	2.326.487.500,00	97,99	1.075.450.000,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	600.000.000	596.750.000,00	99,46	0,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0,00	0,00	110.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	720.700.000	697.237.500,00	96,74	195.800.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	32.000.000	32.000.000,00	100,00	37.000.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	30.000.000	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	582.185.000	567.960.000,00	97,56	425.600.000,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	82.500.000	82.300.000,00	99,76	97.100.000,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruang Pejabat	129.740.000	123.240.000,00	94,99	132.250.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	142.000.000	142.000.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.04.0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	24.000.000	24.000.000,00	100,00	41.700.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	31.000.000	31.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.142.236.000	1.505.577.500,00	70,28	1.948.320.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	164.000.000	164.000.000,00	100,00	310.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0	0,00	0,00	40.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.209.910.000	811.250.000,00	67,05	735.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.000.000	40.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	0	0,00	0,00	129.500.000,00
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	0	0,00	0,00	73.500.000,00
5.1.02.02.05.0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III	0	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	728.326.000	490.327.500,00	67,32	590.320.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,00	0,00	9.081.819,00
5.1.02.02.06.0007	Belanja Sewa Jalan Kereta Api	0	0,00	0,00	9.081.819,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	29.000.000	29.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	29.000.000	29.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.189.730.034	2.624.041.550,00	82,27	5.245.091.523,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0	0,00	0,00	10.416.850,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0	0,00	0,00	178.158.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.865.797.500	2.318.842.900,00	80,91	19.844.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	27.075.000	21.538.650,00	79,55	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	44.500.000	43.833.900,00	98,50	0,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	184.709.534	183.371.000,00	99,28	2.539.734.753,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0	0,00	0,00	1.093.847.600,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0	0,00	0,00	88.705.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	61.048.000	53.874.350,00	88,25	1.314.385.320,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	6.600.000	2.580.750,00	39,10	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	625.291.000	317.561.500,00	50,79	229.799.400,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0	0,00	0,00	79.950.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	0	0,00	0,00	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	165.291.000	43.399.000,00	26,26	23.849.400,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	460.000.000	274.162.500,00	59,60	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0	0,00	0,00	26.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.678.947.800	1.608.727.328,00	95,82	1.522.153.400,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.540.357.800	1.470.137.328,00	95,44	1.272.494.400,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	138.590.000	138.590.000,00	100,00	249.659.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.353.883.280	9.407.544.971,00	90,86	15.294.101.772,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	13.000.000	9.550.000,00	73,46	69.190.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	13.000.000	9.550.000,00	73,46	0,00
5.1.02.03.01.0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	0	0,00	0,00	69.190.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.130.208.767	3.585.379.971,00	86,81	4.310.432.083,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	12.000.000	12.000.000,00	100,00	169.993.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	29.350.000	15.730.000,00	53,59	199.914.000,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	0	0,00	0,00	15.800.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.920.566.407	1.633.291.661,00	85,04	355.459.392,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	291.416.700	243.135.600,00	83,43	1.051.631.296,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	60.000.000	59.945.000,00	99,91	500.593.606,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	759.000.000	722.063.350,00	95,13	840.273.774,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	20.700.000	17.990.000,00	86,91	0,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0	0,00	0,00	2.430.000,00
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	0	0,00	0,00	158.414.600,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.697.000	0,00	0,00	1.684.500,00
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	2.149.000	1.899.000,00	88,37	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah				
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.000.000	9.950.000,00	82,92	186.045.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	400.337.960	284.321.760,00	71,02	436.578.215,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	235.549.000	228.701.000,00	97,09	56.092.800,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36.500.000	34.930.000,00	95,70	74.880.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	4.895.000	4.400.000,00	89,89	0,00
5.1.02.03.02.0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	2.830.000	2.695.000,00	95,23	6.340.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	35.100.000	26.550.000,00	75,64	61.162.500,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0	0,00	0,00	117.903.400,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	98.910.000	94.430.000,00	95,47	31.650.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	136.000.900	123.397.600,00	90,73	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	26.306.800	26.300.000,00	99,97	0,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	9.000.000	9.000.000,00	100,00	9.900.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu	34.900.000	34.650.000,00	99,28	33.686.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Lintas Darat Lainnya				
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.349.608.763	3.218.088.650,00	96,07	10.221.390.639,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.995.668.833	2.888.582.371,00	96,43	9.032.317.339,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	25.000.000	24.950.700,00	99,80	0,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	66.000.000	65.667.000,00	99,50	0,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0	0,00	0,00	987.629.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	77.717.598	77.547.479,00	99,78	0,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	12.548.738	12.500.000,00	99,61	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	157.673.594	133.841.100,00	84,88	201.444.300,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.000.000	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.634.715.000	2.567.326.350,00	97,44	693.089.050,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	1.284.375.000	1.249.531.200,00	97,29	0,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	895.575.000	894.380.000,00	99,87	0,00
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	280.000.000	273.504.000,00	97,68	0,00
5.1.02.03.04.0070	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-	0	0,00	0,00	491.401.350,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Bangunan Waduk Air Kotor				
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	25.200.000	25.062.000,00	99,45	0,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	56.215.000	42.841.300,00	76,21	62.895.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	93.350.000	82.007.850,00	87,85	123.877.700,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0	0,00	0,00	14.915.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	100.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	226.250.750	27.200.000,00	12,02	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	226.250.750	27.200.000,00	12,02	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.983.433.743	26.224.373.459,00	90,48	25.358.258.908,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.983.433.743	26.224.373.459,00	90,48	25.248.260.708,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.340.492.099	19.982.707.909,00	93,64	20.716.309.576,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	83.000.000	81.315.021,00	97,97	112.601.476,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.294.818.145	5.912.542.200,00	81,05	4.372.820.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	198.121.842	186.715.000,00	94,24	0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	67.001.657	61.093.329,00	91,18	46.529.656,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0	0,00	0,00	109.998.200,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa—Luar Negeri	0	0,00	0,00	109.998.200,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.008.216.900	862.040.500,00	85,50	2.902.030.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	733.170.500	589.820.500,00	80,45	2.631.810.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	723.170.500	579.820.500,00	80,18	743.110.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	10.000.000	10.000.000,00	100,00	1.513.700.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0	0,00	0,00	375.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	275.046.400	272.220.000,00	98,97	270.220.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	262.546.400	261.720.000,00	99,69	261.720.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	12.500.000	10.500.000,00	84,00	8.500.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.185.102.800	15.873.707.740,00	98,08	15.776.741.989,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.185.102.800	15.873.707.740,00	98,08	15.776.741.989,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.185.102.800	15.873.707.740,00	98,08	15.776.741.989,00
5.1.04	Belanja Subsidi	470.000.000	470.000.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	470.000.000	470.000.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	470.000.000	470.000.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	470.000.000	470.000.000,00	100,00	200.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	29.753.421.564	15.166.487.962,00	50,97	36.702.542.385,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.030.000.000	1.823.139.500,00	89,81	3.826.498.174,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	0,00	0,00	200.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	0,00	0,00	200.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.030.000.000	1.823.139.500,00	89,81	3.626.498.174,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.030.000.000	1.823.139.500,00	89,81	3.626.498.174,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	8.500.000.000	6.800.000.000,00	80,00	0,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	8.500.000.000	6.800.000.000,00	80,00	0,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	8.500.000.000	6.800.000.000,00	80,00	0,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	0	0,00	0,00	3.869.475.520,00
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0	0,00	0,00	3.869.475.520,00
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0	0,00	0,00	3.869.475.520,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.362.619.547	6.007.046.445,00	41,82	28.470.266.674,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.413.560.000	323.500.000,00	9,48	1.330.524.684,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	383.500.000	323.500.000,00	84,35	545.000.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	0,00	785.524.684,00
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.030.060.000	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	911.370.000	794.100.000,00	87,13	2.219.650.300,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	884.100.000	794.100.000,00	89,82	1.222.700.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	27.270.000	0,00	0,00	996.950.300,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.012.689.547	4.864.446.445,00	48,58	24.870.091.690,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	200.000.000	200.000.000,00	100,00	1.210.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	9.804.589.547	4.664.446.445,00	47,57	23.628.024.690,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Kemasyarakatan				
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.100.000	0,00	0,00	32.067.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	0	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	0	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.000.000	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.324.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.324.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.324.500.000	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	536.302.017	536.302.017,00	100,00	536.302.017,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	536.302.017	536.302.017,00	100,00	536.302.017,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	536.302.017	536.302.017,00	100,00	536.302.017,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.021.802.830	31.141.171.655,00	94,30	49.131.020.993,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.972.055.500	8.083.822.980,00	90,10	15.016.104.635,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.168.100.000	3.813.100.000,00	91,48	8.614.648.975,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.168.100.000	3.813.100.000,00	91,48	8.614.648.975,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	4.803.955.500	4.270.722.980,00	88,90	6.401.455.660,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	4.803.955.500	4.270.722.980,00	88,90	6.401.455.660,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	8.515.946.330	8.312.931.250,00	97,62	11.410.147.888,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang	2.974.000.000	2.901.000.000,00	97,55	5.095.877.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	yang direncanakan kepada Keluarga				
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.974.000.000	2.901.000.000,00	97,55	5.095.877.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.541.946.330	5.411.931.250,00	97,65	6.314.270.888,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.541.946.330	5.411.931.250,00	97,65	6.314.270.888,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	15.533.801.000	14.744.417.425,00	94,92	22.405.887.120,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.000.000	0,00	0,00	110.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.000.000	0,00	0,00	110.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	15.530.801.000	14.744.417.425,00	94,94	22.295.887.120,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	15.530.801.000	14.744.417.425,00	94,94	22.295.887.120,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0,00	0,00	298.881.350,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0,00	0,00	26.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0,00	0,00	26.000.000,00
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0	0,00	0,00	272.881.350,00
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan	0	0,00	0,00	272.881.350,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	(Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
	JUMLAH BELANJA OPERASI	595.256.623.128	540.869.018.366,00	90,86	576.374.939.708,00
5.2	BELANJA MODAL	82.331.873.436	60.336.205.821,00	73,28	142.251.751.256,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	523.400.000	0,00	0,00	13.713.809.182,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	523.400.000	0,00	0,00	13.713.809.182,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0	0,00	0,00	7.327.392.232,00
5.2.01.01.01.0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	0	0,00	0,00	49.800.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0	0,00	0,00	6.832.742.232,00
5.2.01.01.01.0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	0	0,00	0,00	49.950.000,00
5.2.01.01.01.0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	0	0,00	0,00	394.900.000,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	0	0,00	0,00	3.132.050.000,00
5.2.01.01.02.0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	0	0,00	0,00	3.132.050.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	523.400.000	0,00	0,00	3.254.366.950,00
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	300.000.000	0,00	0,00	1.511.525.600,00
5.2.01.01.03.0005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	0	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	183.400.000	0,00	0,00	469.361.350,00
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	40.000.000	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	0	0,00	0,00	1.223.480.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.744.311.095	15.637.989.339,00	93,39	21.363.441.916,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.241.300	5.241.000,00	99,99	116.427.900,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.241.300	5.241.000,00	99,99	116.427.900,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.241.300	5.241.000,00	99,99	16.529.900,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0	0,00	0,00	99.898.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.261.260.989	1.238.780.000,00	98,22	3.811.802.200,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.261.260.989	1.238.780.000,00	98,22	3.811.802.200,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.222.470.989	1.200.000.000,00	98,16	1.353.267.600,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan	38.790.000	38.780.000,00	99,97	513.970.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Bermotor Beroda Dua				
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0	0,00	0,00	1.944.564.600,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.744.000	3.744.000,00	100,00	45.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	3.744.000	3.744.000,00	100,00	45.000.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	3.744.000	3.744.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	16.583.017	10.421.000,00	62,84	217.685.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	16.583.017	10.421.000,00	62,84	217.685.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	10.450.297	10.421.000,00	99,72	3.525.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	6.132.720	0,00	0,00	15.160.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0	0,00	0,00	199.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.952.773.901	4.822.280.513,00	97,37	3.878.720.155,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.246.422.675	1.200.487.500,00	96,31	422.666.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.246.422.675	1.200.487.500,00	96,31	422.666.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.549.972.226	3.481.389.513,00	98,07	2.051.152.355,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.104.874.700	2.089.729.025,00	99,28	732.056.800,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	222.095.556	221.701.488,00	99,82	93.497.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	367.396.400	342.228.000,00	93,15	228.896.250,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	18.790.850	8.678.600,00	46,19	11.385.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	836.814.720	819.052.400,00	97,88	865.027.105,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0	0,00	0,00	120.290.200,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	156.379.000	140.403.500,00	89,78	1.404.901.800,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	35.936.700	35.271.800,00	98,15	878.877.100,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	31.450.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	37.123.100	36.501.400,00	98,33	109.227.700,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	20.396.500	15.430.000,00	75,65	32.964.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	62.922.700	53.200.300,00	84,55	352.383.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.031.759.328	870.275.200,00	84,35	733.636.300,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.031.759.328	870.275.200,00	84,35	733.636.300,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	18.250.000	17.000.000,00	93,15	131.245.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	799.831.300	678.544.300,00	84,84	190.093.300,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	60.170.800	55.640.900,00	92,47	37.663.400,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	153.507.228	119.090.000,00	77,58	374.634.600,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.196.270.950	3.993.106.486,00	95,16	1.706.808.943,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.196.270.950	3.993.106.486,00	95,16	1.697.008.943,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.196.270.950	3.993.106.486,00	95,16	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0	0,00	0,00	1.697.008.943,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0	0,00	0,00	9.800.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0	0,00	0,00	9.800.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	283.300.000	203.152.000,00	71,71	238.639.701,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	226.939.701,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0	0,00	0,00	226.939.701,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	283.300.000	203.152.000,00	71,71	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	84.300.000	4.261.000,00	5,05	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	199.000.000	198.891.000,00	99,95	0,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0	0,00	0,00	11.700.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	0	0,00	0,00	11.700.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.618.725.030	2.247.377.370,00	85,82	6.965.609.156,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.655.691.780	1.614.757.430,00	97,53	1.094.533.200,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.344.310.780	1.305.457.430,00	97,11	893.181.200,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	311.381.000	309.300.000,00	99,33	201.352.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	963.033.250	632.619.940,00	65,69	5.871.075.956,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.880.000	18.880.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	88.908.900	72.285.800,00	81,30	12.685.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	855.244.350	541.454.140,00	63,31	5.858.390.956,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	35.000.000	34.864.000,00	99,61	234.060.500,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	35.000.000	34.864.000,00	99,61	226.960.500,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	35.000.000	34.864.000,00	99,61	0,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0	0,00	0,00	226.960.500,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0	0,00	0,00	7.100.000,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	0	0,00	0,00	7.100.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	0,00	107.974.900,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0	0,00	0,00	107.974.900,00
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	0	0,00	0,00	15.155.000,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	0	0,00	0,00	17.436.300,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0	0,00	0,00	6.195.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0	0,00	0,00	69.188.600,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	206.944.680	65.750.000,00	31,77	830.500.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	206.944.680	65.750.000,00	31,77	830.500.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	0	0,00	0,00	499.522.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	28.344.680	12.770.000,00	45,05	14.100.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	178.600.000	52.980.000,00	29,66	316.878.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	219.872.500	219.869.310,00	100,00	306.731.250,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	219.872.500	219.869.310,00	100,00	306.731.250,00
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	0	0,00	0,00	12.067.200,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	12.794.500	12.794.500,00	100,00	83.868.250,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	0	0,00	0,00	158.480.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	207.078.000	207.074.810,00	100,00	52.315.800,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.912.835.400	1.923.128.460,00	100,54	2.169.845.911,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.912.835.400	1.923.128.460,00	100,54	2.169.845.911,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.912.835.400	1.923.128.460,00	100,54	2.169.845.911,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.586.560.395	21.923.145.455,00	59,92	40.945.930.770,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	32.813.404.695	19.838.430.675,00	60,46	33.117.958.434,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.813.404.695	19.838.430.675,00	60,46	33.117.958.434,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.765.190.069	8.209.929.798,00	84,07	15.958.426.599,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0	0,00	0,00	130.240.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2.037.304.800	1.936.666.775,00	95,06	1.045.027.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.997.350.000	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	700.000.000	645.913.440,00	92,27	1.924.711.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0	0,00	0,00	2.200.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0	0,00	0,00	113.051.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	0,00	0,00	4.170.462.997,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0	0,00	0,00	41.186.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	1.036.811.585	1.000.243.125,00	96,47	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	327.360.000	325.468.150,00	99,42	340.820.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	1.200.000.000	1.157.250.650,00	96,44	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	770.000.000	768.218.377,00	99,77	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.446.917.233	2.402.696.000,00	98,19	6.486.697.061,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	70.000.000	69.555.141,00	99,36	2.239.119.277,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	164.455.000	163.592.500,00	99,48	278.417.500,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.298.016.008	3.158.896.719,00	95,78	387.600.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	109.509.920	0,00	0,00	19.956.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	109.509.920	0,00	0,00	19.956.000,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	109.509.920	0,00	0,00	19.956.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.663.645.780	2.084.714.780,00	56,90	7.808.016.336,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	3.663.645.780	2.084.714.780,00	56,90	7.808.016.336,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	3.663.645.780	2.084.714.780,00	56,90	7.808.016.336,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.463.735.146	18.771.759.227,00	76,73	62.614.371.138,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	20.745.735.146	15.115.486.300,00	72,86	39.371.219.538,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	20.465.735.146	14.934.333.300,00	72,97	39.123.535.538,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	20.066.835.146	14.561.637.400,00	72,57	37.375.053.337,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	398.900.000	372.695.900,00	93,43	1.748.482.201,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	280.000.000	181.153.000,00	64,70	247.684.000,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	280.000.000	181.153.000,00	64,70	0,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	0	0,00	0,00	247.684.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	3.500.000.000	3.438.471.927,00	98,24	17.714.398.700,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	50.000.000	49.720.827,00	99,44	169.800.000,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	50.000.000	49.720.827,00	99,44	169.800.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	550.000.000	545.824.100,00	99,24	10.667.679.700,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	550.000.000	545.824.100,00	99,24	10.667.679.700,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.900.000.000	2.842.927.000,00	98,03	6.876.919.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.900.000.000	2.842.927.000,00	98,03	6.876.919.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	218.000.000	217.801.000,00	99,91	386.741.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	198.000.000	197.886.000,00	99,94	263.542.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	198.000.000	197.886.000,00	99,94	149.250.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0	0,00	0,00	114.292.000,00
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20.000.000	19.915.000,00	99,58	115.229.000,00
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi	20.000.000	19.915.000,00	99,58	115.229.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya				
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0	0,00	0,00	690.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	690.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0	0,00	0,00	7.280.000,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	0	0,00	0,00	7.280.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0	0,00	0,00	5.142.011.900,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	0	0,00	0,00	87.168.400,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	0	0,00	0,00	87.168.400,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0	0,00	0,00	5.054.843.500,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	5.054.843.500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.013.866.800	4.003.311.800,00	99,74	3.614.198.250,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0	0,00	0,00	375.855.150,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0	0,00	0,00	375.855.150,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	0	0,00	0,00	198.176.875,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	0	0,00	0,00	73.900.525,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0	0,00	0,00	103.777.750,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.475.000	7.475.000,00	100,00	125.525.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0	0,00	0,00	125.525.000,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0	0,00	0,00	125.525.000,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	7.475.000	7.475.000,00	100,00	0,00
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	7.475.000	7.475.000,00	100,00	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.006.391.800	3.995.836.800,00	99,74	3.112.818.100,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.006.391.800	3.995.836.800,00	99,74	3.112.818.100,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.006.391.800	3.995.836.800,00	99,74	3.112.818.100,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	82.331.873.436	60.336.205.821,00	73,28	142.251.751.256,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	52.650.368	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	52.650.368	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	52.650.368	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	52.650.368	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	52.650.368	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	52.650.368	52.650.368,00	100,00	2.134.850.082,00
5.4	BELANJA TRANSFER	120.619.760.715	119.562.619.814,00	99,12	104.748.131.372,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.814.825.000	3.183.566.844,00	83,45	1.820.631.270,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.406.075.000	2.843.458.400,00	83,48	1.622.236.500,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.406.075.000	2.843.458.400,00	83,48	1.622.236.500,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.406.075.000	2.843.458.400,00	83,48	1.622.236.500,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	408.750.000	340.108.444,00	83,21	198.394.770,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	408.750.000	340.108.444,00	83,21	198.394.770,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	408.750.000	340.108.444,00	83,21	198.394.770,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.804.935.715	116.379.052.970,00	99,64	102.927.500.102,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	9.929.671.415	9.929.671.415,00	100,00	5.000.000.000,00
5.4.02.02.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	9.929.671.415	9.929.671.415,00	100,00	5.000.000.000,00
5.4.02.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	9.929.671.415	9.929.671.415,00	100,00	5.000.000.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	106.875.264.300	106.449.381.555,00	99,60	97.927.500.102,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	106.875.264.300	106.449.381.555,00	99,60	97.927.500.102,00
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	45.048.128.300	45.048.128.300,00	100,00	97.927.500.102,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan	61.827.136.000	61.401.253.255,00	99,31	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
	Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa				
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	120.619.760.715	119.562.619.814,00	99,12	104.748.131.372,00
	JUMLAH BELANJA	798.260.907.647	720.820.494.369,00	90,30	825.509.672.418,00
	SURPLUS/DEFISIT	(29.789.500.000)	27.939.773.955,63	(93,79)	(35.943.576.338,48)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	29.789.500.000	9.541.034.674,37	32,03	46.484.611.012,85
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.789.500.000	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.789.500.000	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	31.789.500.000	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	31.789.500.000	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	31.789.500.000	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.789.500.000	10.541.034.674,37	33,16	48.484.611.012,85
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	1.000.000.000,00	50,00	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	29.789.500.000	9.541.034.674,37	32,03	46.484.611.012,85
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	37.480.808.630,00	0,00	10.541.034.674,37

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No	Nama Inovasi	Uraian singkatan	OPD
1	Aplikasi e-Kinerja Kota Lhokseumawe	Aplikasi pencatatan yang berbasis elektronik untuk melihat kegiatan kerja harian ASN di Kota Lhokseumawe. Melalui aplikasi ini atasan dapat menilai kinerja dan memonitoring kerja harian bawahannya. atasan langsung juga dapat menyetujui atau menolak kerja harian yang dilakukan bawahannya apabila tidak sesuai dengan tupoksi dan arahan yang diberikan. Aplikasi e-Kinerja ini terintegrasi dengan Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe, apabila data kehadiran tidak tercatat di aplikasi presensi maka ASN tidak bisa mengisi kerja harian disistem sehingga dapat mempengaruhi pembayaran tunjangan prestasi pegawai (TPP).	BKPSDM
2	Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe	Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe merupakan alat untuk mencatat jam kehadiran pegawai. dalam mengisi aplikasi presensi, harus dilakukan dilokasi kantor masing-masing sehingga tercatat secara digital. Aplikasi ini terkoneksi dengan Aplikasi e-Kinerja Kota Lhokseumawe sehingga apabila ASN tidak tercatat kehadiran di aplikasi presensi maka tidak dapat mengisi e-kinerja sehingga mempengaruhi kinerja ASN dan dapat di kontrol oleh atasan langsung untuk kehadiran pegawai melalui aplikasi e-kinerja kota Lhokseumawe.	BKPSDM

No	Nama Inovasi	Uraian singkatan	OPD
3	Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (PEKAD 3 In 1 Plus)	Pekad 3 in 1 Plus merupakan program pelayanan dalam meningkatkan pelayanan administrasi khususnya dalam kepemilikan dokumen kependudukan berupa perubahan kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu identitas anak plus akta kematian. untuk saat ini Disdukcapil Kota Lhokseumawe memberikan pelayanan ini bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak "ABBY". pihak Rumah Sakit bertugas membantu mengumpulkan kelengkapan persyaratan pembuatan dokumen kependudukan. Ketika pasien/keluarga pasien keluar dari Rumah Sakit, pasien/keluarga pasien sudah memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan.	Disdukcapil
4	Layanan Chat Wa Pajak dan Retribusi (Layanan CAWAPRES)	Layanan CAWAPRES adalah layanan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak yang akan membayar PBB (pajak bumi dan bangunan) tanpa harus mendatangi Kantor layanan PBB atau Kantor Geuchik. pembayaran PBB dapat dilakukan secara online pada Aplikasi Action Bank Aceh.	BPKD
5	Klinik Pelayanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINOVA)	Layanan untuk mendapatkan informasi tentang Perizinan Reklame, izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha serta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui chat wa untuk memberikan informasi, bantuan dan konsultasi mengenai prosedur permohonan perizinan.	DPMPTSP
6	Sistem Perizinan dan Layanan Antar Jemput Izin (SIPERI WET WET)	Siperi wet-wet adalah pelayanan perizinan jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan edukasi terkait perizinan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga pelayanan perizinan lebih optimal	DPMPTSP

No	Nama Inovasi	Uraian singkatan	OPD
7	Integrasi Layanan Menerapkan Sistem Online Submission (Whatsapp & On Call)	Whatsaap & on call adalah pelayanan bagi masyarakat untuk membuat izin usaha secara online melalui fitur Sistem Online Submission dan si Cantik Cloud sehingga pelaku usaha mendapatkan informasi secara detil melalui fitur tracking sistem untuk mengetahui status permohonan secara real time	DPMPTSP
8	Sistem Informasi Gampong dan Layanana Online (SIGAMLON)	SIGAMLON merupakan layanan Website yang menunjukkan informasi publik kegiatan Gampong Kuta Blang serta informasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan SIGAMLON dapat mengurus surat menyurat yang menjadi kewenangan Keuchik dengan berbekal NIK dan masyarakat Gampong Kuta Blang dapat memantau tahapan proses pelayanan surat sampai dengan selesai	Gampong Kuta Blang